

<i>e-ISSN: 3062-7389</i>	<i>Journal of Composite Social Humanisme</i> <i>Volume 3 Number 4 (2026), pp. 247-252</i> <i>https://ojs.shahida.or.id/index.php/composite</i>
--------------------------	---

Implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Pendidikan Pancasila berdasarkan teori George C. Edward III

Diah Ayu Dwi Susanti^{1*} & Fitri Mutmainnah²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Kahuripan Kediri^{1,2}

diaha9053@gmail.com¹, fitri@kahuripan.ac.id⁴

*Corresponding Author

Submit: 10 Agustus 2026; revisi: 21 Agustus 2026, diterima: 22 Agustus, 2026

ABSTRAK

Pendidikan Pancasila memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan identitas nasional peserta didik. Tantangan globalisasi menuntut perubahan dalam sistem pendidikan Indonesia agar mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga berkarakter Pancasila. Merespons hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas dan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Dharma Wanita 1 Pare, sekolah berbasis asrama pertama di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mencapai efektivitas tinggi, ditopang oleh komitmen guru dan kepala sekolah yang kuat. Hambatan ditemukan pada keterbatasan fasilitas dan padatnya jadwal asrama. Guru menerapkan metode kooperatif guna mendorong siswa mengkonstruksi pengetahuan Pancasila secara aktif. Disimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah ini memerlukan penguatan sumber daya dan konsistensi koordinasi struktural.

Kata kunci: Kurikulum Merdeka; Pendidikan Pancasila; *boarding school*; teori Edward III

ABSTRACT

Pancasila Education plays an important role in shaping the character and national identity of students. The challenges of globalization demand changes in the Indonesian education system to produce a generation that is not only cognitively intelligent but also rooted in Pancasila values. In response, the government issued the Merdeka Curriculum policy, which emphasizes flexibility and character strengthening through the Pancasila Student Profile. This study describes the implementation of the Merdeka Curriculum in Pancasila Education learning at SMA Dharma Wanita 1 Pare, the first boarding school in Kediri Regency. The results indicate that implementation achieved high effectiveness, supported by strong commitment from teachers and the principal. Obstacles were found in limited facilities and a dense dormitory schedule. Teachers applied cooperative methods to encourage students to actively construct Pancasila knowledge. It is concluded that the implementation of the Merdeka Curriculum at this school requires resource strengthening and consistent structural coordination.

Keywords: Merdeka Curriculum; Pancasila Education; *boarding school*; Edward III theory



Copyright © 2026 The Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai seseorang. Adanya pendidikan yang diupayakan bertujuan untuk memberantas kebodohan, kemiskinan, meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat serta mengangkat harkat martabat suatu bangsa (Pristiwanti et al., 2022; Naja & Suhaimi, 2024). Dengan begitu, begitu pentingnya pendidikan, pemerintah terus berupaya memberikan perhatian serius dari tingkat terendah hingga perguruan tinggi, termasuk dengan menetapkan berbagai kebijakan kurikulum.

Sebagai sebuah aturan yang bersifat dinamis, kurikulum pembelajaran telah melalui perjalanan yang panjang. Ia telah diperbarui setiap beberapa tahun sekali demi menyesuaikan kebutuhan dan karakter dari peserta didik yang berbeda di setiap zamannya. Tercatat kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dimulai dari tahun 1947, tahun 1964, lalu tahun 1973, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997, tahun 2006 atau lebih dikenal dengan sebutan KTSP, kurikulum 2013, hingga yang terakhir yaitu kurikulum merdeka yang digunakan saat ini (Wicaksana & Rachman, 2018).

Dikenal juga sebagai kurikulum prototipe, Kurikulum Merdeka merupakan inisiatif pendidikan Indonesia yang bertujuan memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam merancang proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka juga memberikan ruang dan kebebasan seluas-luasnya kepada siswa dalam berpikir kreatif (Jojo & Sihotang, 2022).

Walaupun begitu, penerapan Kurikulum Merdeka ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Salah satu contoh nyata yang menarik perhatian publik adalah viralnya seorang pelajar yang tidak mengetahui kepanjangan MPR maupun nama ibu kota Provinsi Jawa Timur. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana sesungguhnya pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menyatakan bahwa secara konsep kurikulum ini sebenarnya baik, namun tidak adanya pengawasan yang baik di lapangan membuat anak-anak kehilangan arah (Kompas.com, 2024).

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMA Dharma Wanita 1 Pare, sebuah sekolah swasta berbasis asrama (*boarding school*) pertama di Kabupaten Kediri yang hadir berkat gagasan Bupati Kediri untuk meningkatkan taraf hidup keluarga kurang mampu melalui pendidikan. Keunikan sekolah ini terletak pada sistem asrama yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi selama dua puluh empat jam penuh, serta keterlibatan Putera Sampoerna Foundation (PSF) sebagai mitra konsultan pendidikan yang memberikan pelatihan kepada guru (Putera Sampoerna Foundation, 2023). Kondisi ini menjadikan SMA Dharma Wanita 1 Pare sebagai lokasi penelitian yang menarik untuk dikaji sejauh mana implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila telah berlangsung dengan baik.

Untuk menganalisis temuan lapangan secara mendalam dan sistematis, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai kerangka analisis. Pemilihan teori ini didasarkan pada pertimbangan bahwa model Edward III menawarkan kerangka yang praktis dan komprehensif melalui empat dimensi utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang dinilai paling relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Kurikulum Merdeka diimplementasikan di tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Dharma Wanita 1 Pare, (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta (3) mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni berusaha menggambarkan secara mendalam bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka berlangsung di lapangan berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Lokasi penelitian adalah SMA Dharma Wanita 1 Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2025.

Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung subjek dalam proses implementasi Kurikulum Merdeka. Subjek penelitian meliputi: (A) Kepala Sekolah, (B1) Wakil Kepala Bidang Kurikulum, (B2) Guru Pendidikan Pancasila, serta (C1 dan C2) dua siswa yang dipilih karena keterlibatan aktif mereka dalam proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila

a) Perencanaan

Dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, instansi pendidikan memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang agar pembelajaran di kelas dapat berjalan efektif. Di SMA Dharma Wanita 1 Pare, peneliti menemukan bahwa persiapan yang dilakukan sudah cukup komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.

Dukungan pemerintah merupakan salah satu bentuk nyata dari dimensi sumber daya dalam teori Edward III. Di sekolah ini, dukungan tersebut hadir dalam bentuk beasiswa bagi seluruh siswa asrama yang merupakan anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta keterlibatan Putera Sampoerna Foundation (PSF) yang memberikan pelatihan komprehensif dan berkelanjutan bagi guru tentang penerapan Kurikulum Merdeka (Septiani, 2024). Selain kerja sama dengan PSF, sekolah juga secara aktif mendapatkan undangan pelatihan dari Dinas Pendidikan, mendapatkan pendampingan dari SMA Pawiyatan Daha sebagai salah satu sekolah penggerak di Kediri, serta pengawasan dari pengawas sekolah.

Peran kepala sekolah pun tidak kalah penting. Beliau aktif mendatangkan pelatih, membentuk Komunitas Belajar Laka Suka, serta secara rutin membagikan informasi dan memberikan dukungan moril kepada guru melalui rapat dinas dan apel pagi. Hal ini mencerminkan dimensi komunikasi dalam teori Edward III, di mana kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi antar pemangku kepentingan turut menentukan kelancaran implementasi kebijakan (Septiani, 2024).

Kompetensi guru Pendidikan Pancasila mencerminkan dua dimensi sekaligus dalam teori Edward III, yakni dimensi sumber daya dari segi kualitas SDM pelaksana kebijakan, serta dimensi disposisi yang tercermin dari komitmen guru untuk terus belajar dan beradaptasi (Septiani, 2024). Guru juga telah memahami perbedaan mendasar Kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, aktif mengikuti pelatihan baik online maupun offline, serta memahami perangkat pembelajaran mulai dari TP, CP, ATP, modul ajar, hingga P5 sebagai bagian dari perangkat ajar.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap selanjutnya setelah perencanaan yang matang selesai dilakukan. Dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas, guru menggunakan metode Jigsaw sebagai strategi yang dinilai paling efektif, dengan tetap mempertahankan fleksibilitas dalam penyesuaian metode sesuai kebutuhan siswa. Pembelajaran dilaksanakan sesuai modul ajar dengan memasukkan unsur kooperatif dan kolaboratif, serta memanfaatkan teknologi secara maksimal melalui proyektor, internet, dan perangkat digital lainnya.

Dimensi komunikasi dalam teori Edward III tercermin dari cara guru menyampaikan materi yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan nyata siswa. Guru yang mampu menerjemahkan kebijakan Kurikulum Merdeka ke dalam pembelajaran yang relevan dan menyenangkan menunjukkan bahwa kebijakan telah tersampaikan dengan baik hingga ke tingkat pelaksanaan di kelas (Mukhlisin et al., 2024). Siswa sendiri mengaku merasa senang dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila karena guru memberikan analisis dari kehidupan nyata sehingga materi terasa lebih mudah dipahami.

Sementara itu, dimensi disposisi dalam teori Edward III tercermin dari sikap positif guru

yang berperan sebagai fasilitator dan memberikan ruang bagi siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa (Agustiana et al., 2023). Dengan pendekatan tersebut, beberapa dampak positif berhasil diidentifikasi, di antaranya: siswa menjadi lebih kreatif, bernalar kritis, dan kolaboratif, nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa meningkat, serta yang paling menggembirakan adalah siswa mampu memahami, merasakan, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka di lingkungan asrama.

c) Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus implementasi kebijakan yang tidak bisa diabaikan. Di SMA Dharma Wanita 1 Pare, evaluasi dilaksanakan melalui tiga jenis asesmen yaitu formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran, diagnostik untuk pemetaan kebutuhan siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi, dan sumatif yang dilaksanakan di akhir bab. Selain asesmen di tingkat kelas, sekolah juga menerapkan evaluasi IRB (Identifikasi, Rubah, Benahi) secara berkala sebagai mekanisme perbaikan internal.

Sistem evaluasi yang dilaksanakan secara digital melalui platform Kemendikbudristek dan secara langsung melalui pengawas sekolah mencerminkan dimensi struktur birokrasi dalam teori Edward III, di mana mekanisme pengawasan dan pelaporan yang terstruktur menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan secara keseluruhan (Septiani, 2024).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis Kurikulum Merdeka di SMA Dharma Wanita 1 Pare, peneliti menemukan beberapa faktor pendukung yang ikut menentukan keberhasilan implementasi. Ketersediaan media elektronik dan buku pegangan guru mencerminkan dimensi sumber daya dalam teori Edward III, di mana kelengkapan fasilitas fisik merupakan salah satu prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan (Septiani, 2024). Sistem pelatihan dan kerja sama dengan PSF, Dinas Pendidikan, dan SMA Pawiyatan Daha mencerminkan dimensi sumber daya sekaligus dimensi komunikasi dalam teori Edward III (Septiani, 2024). Selain itu, usia guru yang relatif muda menjadi keunggulan tersendiri karena membuat mereka lebih adaptif terhadap teknologi dan perubahan kurikulum. Yang tidak kalah penting, sistem asrama yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi selama dua puluh empat jam penuh menjadi faktor pendukung yang unik dan menjadi ciri khas sekolah ini.

Di sisi lain, beberapa faktor penghambat juga ditemukan dalam penelitian ini. Fasilitas elektronik yang belum sepenuhnya lengkap, terutama LCD proyektor yang belum tersedia di setiap kelas, menjadi kendala yang cukup terasa. Selain itu, jadwal asrama yang padat sering membuat siswa mengantuk saat pembelajaran berlangsung. Penyampaian materi yang terkadang monoton serta potensi penyalahgunaan HP selama pembelajaran, serta siswa yang kadang terlambat karena padatnya jadwal juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Hambatan-hambatan tersebut sejalan dengan dimensi sumber daya dan struktur birokrasi dalam teori Edward III, yang menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas dan kurangnya koordinasi antar pihak dapat menghambat implementasi kebijakan secara keseluruhan (Agustiana et al., 2023).

3. Upaya Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, guru dan pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya kreatif. Ketika LCD proyektor tidak tersedia, guru meminjam dari sekolah atau menggantinya dengan model pembelajaran alternatif yang sesuai dengan tema. Untuk mengatasi siswa yang mengantuk, guru melakukan *ice breaking* atau permainan sehingga suasana kelas kembali hidup. Masalah keterlambatan siswa setelah istirahat diatasi dengan himbauan langsung dari waka kurikulum melalui apel pagi, sementara potensi penyalahgunaan HP diatasi dengan menyediakan tempat khusus penyimpanan HP saat pembelajaran berlangsung.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh guru dan pihak sekolah dalam mengatasi hambatan tersebut mencerminkan dimensi disposisi dalam teori Edward III, yakni komitmen dan inisiatif para pelaksana kebijakan untuk terus mencari solusi agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan seoptimal mungkin meskipun dihadapkan pada keterbatasan yang ada (Mukhlisin et al., 2024).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Dharma Wanita 1 Pare secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan ini dapat dijelaskan melalui terpenuhinya keempat dimensi utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah kebijakan.

Dimensi komunikasi terpenuhi melalui peran aktif kepala sekolah dalam menyosialisasikan Kurikulum Merdeka kepada guru secara konsisten melalui rapat dinas, apel pagi, dan Komunitas Belajar Laka Suka. Dimensi sumber daya terpenuhi melalui dukungan beasiswa pemerintah, keterlibatan PSF melalui program SDO, ketersediaan media pembelajaran, dan kompetensi guru yang terus dikembangkan. Dimensi disposisi tercermin dari komitmen dan sikap positif guru dalam mengadaptasi metode pembelajaran sesuai tuntutan Kurikulum Merdeka, termasuk penggunaan metode *Jigsaw* dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Sementara dimensi struktur birokrasi terpenuhi melalui mekanisme evaluasi IRB dan pengawasan berjenjang dari pengawas sekolah hingga platform digital Kemendikbudristek.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Septiani (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana keempat dimensi dalam teori Edward III dapat dipenuhi secara memadai. Hal yang membedakan penelitian ini adalah konteks unik boarding school yang menjadi nilai lebih tersendiri, di mana sistem asrama memperkuat dimensi disposisi karena memungkinkan interaksi guru dan siswa berlangsung selama dua puluh empat jam penuh, sehingga pembentukan karakter berlandaskan nilai-nilai Pancasila dapat berlangsung secara intensif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Dharma Wanita 1 Pare telah berjalan dengan baik. Keempat dimensi teori Edward III terpenuhi secara memadai: komunikasi yang berjalan baik antara sekolah dan guru, ketersediaan sumber daya yang cukup termasuk dukungan PSF, disposisi atau komitmen positif dari kepala sekolah dan guru, serta struktur birokrasi sekolah yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Sistem asrama menjadi keunggulan tersendiri yang memperkuat dimensi disposisi, karena memungkinkan guru berinteraksi dengan siswa selama dua puluh empat jam penuh sehingga pembentukan karakter berlangsung secara intensif dan konsisten. Berkat hal tersebut, peserta didik mampu memahami, merasakan, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai output nyata dari keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Penelitian ini merekomendasikan agar sekolah terus meningkatkan kelengkapan fasilitas elektronik, memperkuat variasi metode pembelajaran agar siswa tidak bosan, serta mengoptimalkan koordinasi jadwal asrama dengan kegiatan pembelajaran. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam mengkaji implementasi kebijakan pendidikan di sekolah-sekolah dengan karakteristik unik seperti *boarding school*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, D. M., Malik, M., & Rumiati, S. (2023). Analisis Pembelajaran Berdiferensiasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Merdeka. *Journal of Citizenship Virtues*, 3(2), 522–533. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1869>
- Jojo, A., & Sihotang, H. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5150–5161. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3106>
- Kompas.com. (2024). *Pelajar Tak Tahu Kepanjangan MPR, Pakar Unesa: Rendahnya Pengetahuan Umum Jadi Bahan Refleksi*. Diakses dari <https://kompas.com>
- Mukhlisin, A., Putri, C. T., Syuhadi, F., Ningsih, P. R., & Hasibuan, S. B. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan di MTs PAB 2 Sampali. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*, 2(1), 84–97. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i1.2446>

- Naja, A. D. & Suhaimi, I. (2024) Representation Of Freedom As An Embodiment Of The Spirit Of Nationalism For Students Of Sman 1 Kandangan Kediri District. *Literacy: Journal of Education and Social Science*. 2(1), 22-33.
- Pristiwanti, D., Badriah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 7911–7915.
- Putera Sampoerna Foundation. (2023). *School Development Outreach*. Diakses dari <https://www.sampoernafoundation.org/en/ourpillar/school-development-outreach>
- Septiani, E. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Teori Edward III di Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Pendidikan*, 3(9), 287–294.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Sejarah Di SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2022/2023. *Jurnal Pendidikan*, 3(1), 2–3